

Nama : Ni Wayan Vara Wulandari

NPM : 2313031017

Kelas : A

Tugas Portofolio

Manipulasi Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (2018)

<https://www.kompasiana.com/dewiindahpurnami0007/62a2104f2098ab50954dc662/pelanggaran-etika-profesi-dalam-skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-garuda-indonesia-tahun-2018>

Identitas Sumber

Judul : Pelanggaran Etika Profesi dalam Skandal Manipulasi Laporan Keuangan
PT Garuda Indonesia Tahun 2018

Penulis : Dewi Indah Purnami

Platform : Kompasiana

Topik utama : Pelanggaran prinsip akuntansi dan etika auditor dalam pengakuan
pendapatan piutang yang tidak wajar

Hasil

Masalah utama dalam skandal ini bermula dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 yang secara mengejutkan mencatatkan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu. Padahal, pada tahun sebelumnya, perusahaan mengalami kerugian besar. Perubahan drastis ini dipicu oleh pengakuan pendapatan dari kesepakatan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan konektivitas di dalam pesawat. Inti masalahnya adalah PT Garuda Indonesia mengakui pendapatan sebesar USD 239,94 juta dari Mahata sebagai pendapatan operasional, padahal dana tersebut masih bersifat piutang dan belum diterima secara tunai.

Secara substansi, pengakuan ini melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena pendapatan diakui terlalu dini sebelum hak dan kewajiban benar-benar berpindah secara penuh, sehingga laporan keuangan menjadi "terpoles" (*window dressing*) untuk menyembunyikan kerugian yang sebenarnya masih terjadi.

Dalam konteks pemeriksaan akuntansi, kasus ini mencerminkan kegagalan pada beberapa titik krusial:

a. Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (member of BDO International) dinilai gagal dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam auditing, terdapat prinsip "*Substance Over Form*" (substansi mengungguli bentuk hukum). Auditor seharusnya tidak hanya melihat adanya kontrak tertulis, tetapi menilai apakah secara ekonomi pendapatan tersebut layak diakui sesuai dengan PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

b. Kegagalan dalam Menilai Materialitas dan Risiko Audit

Nilai kontrak dengan Mahata sangatlah material karena mengubah posisi laporan dari rugi menjadi laba. Auditor seharusnya menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang lebih tinggi terhadap transaksi yang sifatnya tidak biasa (*unusual transaction*) dan memiliki nilai yang sangat signifikan di akhir periode laporan.

c. Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan

Berdasarkan Kode Etik IAPI, seorang auditor harus menjaga prinsip Integritas dan Obyektivitas. Dalam kasus ini, auditor dianggap tidak obyektif karena meloloskan laporan keuangan yang jelas-jelas mengandung salah saji material. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai independensi auditor terhadap klien (Garuda Indonesia sebagai BUMN besar).

Menurut pendapat saya, kasus Garuda Indonesia ini adalah cermin dari lemahnya integritas dalam rantai pelaporan keuangan. Saya menilai bahwa manajemen perusahaan terlalu fokus pada hasil akhir agar terlihat baik di mata pemegang saham, namun mengabaikan kejujuran dalam menyajikan data. Bagi saya, laporan keuangan bukan hanya sekadar deretan angka untuk pamer prestasi, melainkan tanggung jawab moral kepada publik dan investor. Ketika manajemen melakukan *window dressing* atau

"memoles" laporan keuangan, mereka sebenarnya sedang menghancurkan kepercayaan pasar modal.

Dari sisi pemeriksaan akuntansi, Kantor Akuntan Publik (KAP) bertindak sebagai benteng terakhir yang menjaga kebenaran informasi. Namun, fakta bahwa laporan tersebut sempat lolos dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuktikan bahwa hubungan profesional antara auditor dan klien bisa menjadi sangat bias. Saya berpendapat bahwa independensi auditor seringkali terancam oleh kepentingan bisnis KAP itu sendiri. Jika auditor terlalu takut kehilangan klien besar seperti Garuda, maka fungsi pemeriksaan akuntansi sebagai pemberi jaminan kualitas laporan keuangan akan hilang sama sekali.

Selain itu, saya melihat perlunya penguatan pada fungsi audit internal di dalam perusahaan BUMN. Jika sistem pengawasan internalnya kuat, seharusnya tindakan manipulasi seperti ini bisa dicegah sebelum dilaporkan ke publik. Pelajaran berharga yang saya petik adalah bahwa sebagai calon akuntan atau pemeriksa, kita tidak boleh hanya mahir secara teknis dalam menghitung angka, tetapi harus memiliki keberanian moral untuk berkata "tidak" pada praktik-praktik yang melanggar etika, meskipun itu datang dari perintah atasan.

Kesimpulan

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan akuntansi memegang peranan vital yang tidak tergantikan dalam menjaga transparansi ekonomi. Kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia membuktikan bahwa tanpa adanya integritas dari auditor dan kejujuran dari manajemen, laporan keuangan hanyalah angka hampa yang menyesatkan. Pelanggaran standar akuntansi dan kegagalan dalam menerapkan skeptisisme profesional telah mengakibatkan runtuhnya kredibilitas laporan keuangan BUMN tersebut. Oleh karena itu, integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik harus diletakkan di atas segala kepentingan komersial demi menjamin keadilan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Mega Skandal PT Asuransi Jiwasraya

(<https://web.unikom.ac.id/mega-skandal-pt-asuransi-jiwasraya/>)

Identitas Sumber

Judul : Kasus Jiwasraya: Mengapa Bisa Gagal Bayar dan Terjadi Dugaan Korupsi?

Penulis : Tim Redaksi

Jenis Sumber : BBC News Indonesia

Topik Utama : Gagal bayar klaim polis JS Saving Plan, investasi pada aset berisiko dan dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan untuk menutupi defisit perusahaan.

Hasil

Berdasarkan berbagai informasi yang saya himpun mengenai skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kasus ini merupakan salah satu kegagalan institusi keuangan terbesar di Indonesia yang berdampak sistemik. Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis produk *JS Saving Plan* sebesar Rp12,4 triliun yang jatuh tempo pada akhir 2018. Fenomena ini sangat mengejutkan publik karena institusi ini adalah perusahaan asuransi jiwa tertua milik negara. Masalah utama yang mencuat bukan hanya soal ketidakmampuan bayar, melainkan adanya dugaan kuat mengenai investasi bodong dan rekayasa laporan keuangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Melalui sumber berita dan laporan analisis media massa, diketahui bahwa Jiwasraya melakukan investasi pada aset-aset berisiko tinggi (saham-saham berkinerja buruk atau "saham gorengan") demi mengejar imbal hasil (*return*) yang tinggi namun tidak realistis. Untuk menutupi kerugian investasi tersebut, manajemen melakukan praktik akuntansi kreatif agar perusahaan tetap terlihat solven. Dari kacamata pemeriksaan akuntansi, perusahaan ini terus memoles laporan keuangannya agar menunjukkan laba semu, sehingga kewajiban kepada nasabah tidak terlihat menumpuk di atas kertas. Krisis likuiditas ini akhirnya meledak ketika perusahaan tidak lagi mampu

menutupi klaim yang jatuh tempo, mengungkap tabir gelap di balik angka-angka "sehat" yang selama ini dilaporkan.

Jika saya analisis dari sudut pandang materi pemeriksaan akuntansi, kasus Jiwasraya mencerminkan kegagalan total dalam penerapan fungsi audit, baik audit internal maupun eksternal. Terdapat beberapa aspek audit krusial yang dilanggar:

a. Kegagalan dalam Menilai Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Dalam standar audit, auditor wajib memberikan opini mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam kasus Jiwasraya, kondisi ekuitas perusahaan sebenarnya sudah negatif sejak lama (insolven). Namun, laporan audit selama bertahun-tahun seolah mengabaikan indikasi gagal bayar ini. Auditor eksternal seharusnya memberikan opini *Adverse* (Tidak Wajar) atau setidaknya menyertakan paragraf penekanan mengenai ketidakpastian kelangsungan usaha yang material.

b. Kualitas Bukti Audit pada Aset Investasi

Dalam pemeriksaan akuntansi, aset investasi harus dinilai berdasarkan nilai wajar yang objektif. Auditor dinilai gagal dalam memverifikasi nilai aset investasi Jiwasraya yang ditempatkan pada reksa dana berkualitas rendah. Auditor seharusnya tidak hanya menerima nilai yang disodorkan manajemen, tetapi melakukan pengujian substantif terhadap harga pasar aset tersebut. Kelalaian dalam melakukan verifikasi fisik dan penilaian nilai wajar ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi sangat menyesatkan.

c. Pelanggaran Kode Etik dan Independensi

Munculnya fakta bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap diberikan meskipun kondisi keuangan sangat rapuh menunjukkan adanya ancaman terhadap independensi auditor. Tekanan dari klien atau keinginan untuk mempertahankan kontrak audit jangka panjang seringkali membuat auditor kehilangan objektivitasnya. Hal ini mencederai prinsip integritas yang merupakan fondasi utama profesi akuntan publik.

Menurut pendapat saya, kasus Jiwasraya adalah "tragedi etika" di industri keuangan Indonesia. Saya melihat bahwa rekayasa laporan keuangan yang dilakukan bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan kejahatan kerah putih yang terencana. Sebagai

mahasiswa ekonomi, saya merasa sangat prihatin karena kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan pasar modal menjadi hancur akibat ulah segelintir oknum. Manajemen Jiwasraya telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) demi mengejar pertumbuhan angka yang sifatnya semu.

Selain itu, kasus ini menekankan pada lemahnya peran auditor internal dan dewan pengawas. Audit internal seharusnya menjadi sistem peringatan dini bagi perusahaan. Namun, dalam kasus ini, pengawasan internal seolah mandul atau mungkin dibungkam oleh kekuasaan manajemen. Dari sisi auditor eksternal, saya menilai perlu adanya sanksi yang lebih berat daripada sekadar sanksi administratif. Auditor yang dengan sengaja menutupi "lubang" keuangan perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum karena tindakan mereka telah merugikan ribuan nasabah dan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Pemeriksaan akuntansi di industri asuransi harus jauh lebih ketat dibandingkan industri lainnya. Hal ini dikarenakan asuransi mengelola dana masyarakat jangka panjang. Seorang pemeriksa akuntansi di sektor ini harus memiliki pemahaman mendalam tidak hanya soal angka, tetapi juga soal profil risiko investasi. Pelajaran penting bagi saya sebagai calon lulusan Universitas Lampung adalah bahwa profesionalisme tanpa integritas hanya akan melahirkan kehancuran. Kita harus berani menyuarkan kebenaran laporan keuangan meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari pihak manajemen yang paling berkuasa sekalipun.

Kesimpulan

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa skandal PT Asuransi Jiwasraya merupakan bukti nyata betapa berbahayanya manipulasi laporan keuangan dan kelalaian audit bagi kestabilan ekonomi. Kegagalan auditor dalam memberikan peringatan mengenai kelangsungan usaha serta ketidakmampuan mendeteksi aset investasi yang tidak berkualitas telah menyesatkan para pemangku kepentingan selama bertahun-tahun. Pemeriksaan akuntansi yang jujur dan skeptis adalah syarat mutlak bagi perlindungan nasabah.

Kasus Manipulasi SNP Finance

[\(https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pt-snp-berimbaspencabutan-izin-akuntan-publik-1t5bb38917257f0/\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pt-snp-berimbaspencabutan-izin-akuntan-publik-1t5bb38917257f0/)

Identitas Sumber

Judul : Belajar dari Kasus PT SNP Berimbaspencabutan Izin Akuntan Publik

Jenis Sumber : Hukumonline

Penulis : Tim Redaksi Hukumonline

Topik Utama : Sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Kemenkeu dan OJK akibat kegagalan deteksi manipulasi piutang serta opini audit yang tidak sesuai kenyataan

Hasil

Berdasarkan informasi yang saya telaah dari artikel di *Hukumonline*, kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merupakan salah satu contoh paling fatal mengenai bagaimana kejahatan korporasi dapat berjalan mulus karena dukungan dari laporan keuangan yang tidak akurat. SNP Finance, yang merupakan anak usaha dari grup ritel besar Columbia, terlibat dalam skandal pemalsuan data piutang untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Perusahaan ini memanipulasi daftar piutang nasabahnya guna mendapatkan kucuran dana pinjaman dari 14 bank, yang kemudian berujung pada kredit macet senilai miliaran rupiah.

Masalah utama dalam perspektif pemeriksaan akuntansi di sini bukan hanya terletak pada niat jahat manajemen untuk melakukan *fraud*, melainkan pada fakta bahwa laporan keuangan yang telah dimanipulasi tersebut berhasil lolos dari pemeriksaan akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (salah satu mitra Deloitte Indonesia) dianggap gagal mendeteksi adanya piutang fiktif tersebut. Akibatnya, laporan audit tersebut memberikan keyakinan palsu kepada pihak bank selaku kreditur, yang akhirnya memicu kerugian finansial yang masif di sektor perbankan Indonesia.

Kasus SNP Finance ini memberikan pelajaran sangat berharga terkait standar profesionalisme dalam pemeriksaan akuntansi. Jika saya tinjau dari materi perkuliahan, terdapat beberapa titik kritis kegagalan audit yang terjadi:

a. Kegagalan dalam Prosedur Konfirmasi Piutang

Dalam auditing, konfirmasi piutang adalah prosedur wajib untuk memastikan keberadaan aset. Auditor seharusnya mengirimkan surat konfirmasi langsung kepada nasabah untuk memvalidasi saldo piutang. Dalam kasus SNP, auditor dinilai tidak melakukan pengujian yang mendalam terhadap data piutang yang ternyata fiktif. Kegagalan ini melanggar standar audit mengenai perolehan bukti audit yang cukup dan kompeten.

b. Kualitas Pengendalian Intern (Internal Control)

Auditor seharusnya mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern perusahaan berjalan efektif. Faktanya, manipulasi data piutang bisa terjadi secara sistematis di dalam perusahaan tanpa terdeteksi oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor terlalu mengandalkan representasi manajemen tanpa melakukan uji petik (*sampling*) yang representatif dan skeptis.

c. Sanksi dan Tanggung Jawab Profesional

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Kementerian Keuangan mencabut izin akuntan publik terkait. Ini adalah sanksi tertinggi dalam profesi akuntan publik. Dari teori pemeriksaan, ini membuktikan bahwa "Opini Audit" memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Seorang auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien yang membayar mereka, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada publik dan lembaga keuangan yang menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut pendapat saya, kasus SNP Finance ini adalah sebuah pengingat keras bahwa nama besar sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak menjamin kualitas audit jika integritas individu di dalamnya goyah. Sangat ironis melihat bagaimana sebuah KAP yang berafiliasi dengan jaringan internasional bisa gagal mendeteksi piutang fiktif yang jumlahnya sangat material. Saya berpendapat bahwa dalam kasus ini, auditor mungkin terjebak dalam rutinitas pemeriksaan sehingga kehilangan "insting" untuk mencurigai transaksi yang tidak wajar.

Selain itu, sanksi pencabutan izin adalah bahwa hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga marwah profesi akuntan. Tanpa sanksi tegas, auditor mungkin akan terus merasa "nyaman" di bawah ketiak manajemen klien. Sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa integritas seorang pemeriksa akuntansi diuji saat mereka menemukan kejanggalan pada data klien besar. Apakah mereka berani menyuarakannya, atau memilih diam demi kelangsungan kontrak kerja? Dalam kasus SNP, diamnya auditor telah merugikan banyak pihak. Sehingga, auditor harus lebih memahami proses bisnis klien secara digital. Manipulasi di era sekarang seringkali dilakukan melalui sistem informasi akuntansi yang canggih. Oleh karena itu, seorang auditor masa kini tidak boleh hanya mengerti akuntansi secara manual, tetapi harus mampu melakukan *audit around the computer* dan *audit through the computer* untuk memastikan bahwa data digital yang disodorkan manajemen benar-benar valid dan bukan hasil rekayasa sistem.

Kesimpulan:

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan akuntansi bukan sekadar proses mencocokkan angka, melainkan proses pembuktian kebenaran yang berdampak pada stabilitas ekonomi. Kegagalan auditor dalam kasus SNP Finance untuk mendeteksi piutang fiktif telah membuktikan bahwa skeptisisme profesional dan ketelitian dalam pengujian substantif piutang adalah hal yang mutlak. Pencabutan izin akuntan publik menjadi pelajaran pahit bahwa kepercayaan publik adalah aset terbesar seorang auditor; sekali kepercayaan itu dikhianati melalui laporan yang tidak akurat, maka tamatlah karier profesionalnya. Integritas dan kepatuhan pada standar audit harus selalu menjadi panglima dalam setiap penugasan pemeriksaan.

EVALUASI PENGARUH INDEPENDENSI, SKEPTISISME, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA SEBAGAI MODERASI

(<https://jurnal.iapi.or.id/index.php/ijaa/article/download/10/55>)

Identitas Sumber

Judul : Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi

Lokasi : Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Surabaya

Topik Utama: Analisis kritis terhadap determinan kualitas audit dan peran etika sebagai variabel moderasi pada auditor di wilayah Surabaya.

Hasil

Berdasarkan materi yang saya pelajari dari artikel jurnal ini, kualitas audit merupakan isu sentral yang tidak pernah kehilangan relevansinya dalam dunia akuntansi profesional. Masalah utama yang diangkat oleh peneliti berakar pada adanya kesenjangan hasil (*research gap*) dari berbagai studi terdahulu mengenai faktor-faktor yang secara konsisten memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Dalam praktiknya, masyarakat dan pemangku kepentingan sangat bergantung pada opini auditor untuk mengambil keputusan ekonomi yang krusial. Namun, sejarah mencatat bahwa kegagalan audit sering terjadi justru ketika auditor kehilangan objektivitasnya.

Penelitian ini memfokuskan pengamatannya pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya, sebuah kota metropolis yang menjadi pusat aktivitas bisnis di Jawa Timur. Fenomena yang menarik di sini adalah bagaimana para auditor tetap menjaga profesionalisme mereka di tengah tekanan lingkungan kerja pasca-pandemi yang menuntut efisiensi tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Peneliti berusaha membongkar apakah kompetensi teknis yang tinggi dan sikap skeptis sudah cukup untuk menjamin laporan yang akurat, ataukah ada faktor "Etika" yang harus berperan sebagai pengikat utama di antara variabel-variabel tersebut.

Menelaah jurnal ini dari sisi keilmuan pemeriksaan akuntansi, terdapat beberapa analisis mendalam yang dapat ditarik dari hasil pengujian data melalui regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*:

a. Independensi sebagai Fondasi Mutlak

Hasil penelitian menunjukkan secara tegas bahwa hanya variabel independensi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dalam perspektif saya, hal ini menegaskan bahwa independensi bukan sekadar aturan formal, melainkan mentalitas. Auditor yang jujur dan tidak memihak akan tetap melaporkan temuan apa adanya, terlepas dari seberapa besar tekanan yang diberikan oleh klien. Ini selaras dengan teori atribusi yang digunakan peneliti, di mana perilaku auditor dipengaruhi oleh kekuatan internal berupa integritas diri.

b. Kesenjangan Kualitas pada Auditor Junior

Temuan yang menunjukkan bahwa skeptisisme profesional dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan bagi profesi ini. Peneliti menjelaskan bahwa responden penelitian didominasi oleh auditor dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun. Secara teoretis, skeptisisme membutuhkan kemampuan untuk "mencium" adanya ketidakberesan di balik dokumen. Namun, bagi auditor pemula, fokus mereka sering kali habis hanya untuk menyelesaikan prosedur administratif atau pengisian kertas kerja (checklist) demi memenuhi target waktu. Ini membuktikan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup; pengalaman lapangan adalah guru terbaik dalam mengasah ketajaman audit.

c. Anomali Peran Etika Auditor

Salah satu poin yang paling kontroversial dalam jurnal ini adalah kegagalan variabel etika dalam memoderasi hubungan antara kompetensi dan skeptisisme terhadap kualitas audit. Bahkan, interaksi etika dengan independensi memberikan hasil negatif. Analisis saya menunjukkan bahwa aturan etika yang terlalu kaku atau tuntutan kode etik yang kompleks tanpa didasari oleh independensi yang kuat justru dapat membebani auditor secara psikologis. Auditor mungkin merasa terlalu takut melakukan kesalahan prosedur sehingga mereka kehilangan fokus pada esensi pemeriksaan itu sendiri.

Menurut pendapat saya, artikel ini memberikan potret yang jujur mengenai kondisi auditor di lapangan, khususnya di kota besar seperti Surabaya. Saya melihat adanya tren

di mana auditor muda terjebak dalam "Audit administratif" dibandingkan "Audit substantif". Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa keberhasilan sebuah pemeriksaan bukan diukur dari seberapa tebal kertas kerja yang dihasilkan, melainkan dari seberapa berani seorang auditor menyuarakan kebenaran atas temuan yang ada. Selain itu, penelitian ini seharusnya menjadi dasar bagi KAP untuk mengevaluasi kembali sistem mentoring mereka. Jika auditor junior belum memiliki skeptisisme yang tajam, maka peran manajer audit atau partner menjadi sangat krusial untuk memberikan supervisi yang lebih ketat. Kita tidak bisa membiarkan kualitas laporan keuangan hanya bergantung pada prosedur rutin yang dilakukan oleh staf yang baru lulus kuliah.

Mengenai independensi yang menjadi satu-satunya faktor signifikan, saya melihat ini sebagai pengingat bagi universitas. Di kampus, kita banyak belajar rumus akuntansi dan standar auditing, namun pendidikan karakter dan keteguhan prinsip sering kali dianggap sebagai materi sampingan. Jurnal ini membuktikan bahwa di dunia kerja nyata, karakter (independensi) adalah hal yang paling dihargai oleh pasar dan paling berdampak pada kualitas pekerjaan kita.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit di KAP wilayah Surabaya sangat ditentukan oleh integritas personal atau independensi masing-masing auditor. Faktor-faktor lain seperti kompetensi dan skeptisisme profesional ternyata belum mampu memberikan kontribusi maksimal dalam sampel penelitian ini, kemungkinan besar karena faktor minimnya pengalaman kerja lapangan dari para responden.

Pengaruh penggunaan Artificial Intelligence dan Big Data Analytics terhadap kualitas audit di era audit digital

(<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/21445>)

Identitas Sumber

Judul : Pengaruh penggunaan *Artificial Intelligence* dan *Big Data Analytics* terhadap kualitas audit di era audit digital

Penulis : Raymond

Publikasi : Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen

Topik Utama: Transformasi digital dalam pemeriksaan akuntansi menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data skala besar

Hasil

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, volume data keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa atau sering disebut dengan *Big Data*. Masalah utama yang dihadapi oleh profesi auditor saat ini adalah keterbatasan metode audit tradisional yang masih bersifat manual. Metode lama yang hanya mengandalkan pengambilan sampel (*sampling*) dirasa tidak lagi cukup untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data Analytics* menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Teknologi ini memungkinkan auditor untuk beralih dari pemeriksaan sebagian data menjadi pemeriksaan seluruh populasi data secara otomatis. Dengan AI, proses pengidentifikasian risiko dapat dilakukan dengan lebih tajam karena mesin memiliki kemampuan untuk belajar dari data sejarah perusahaan dan mendeteksi adanya kejanggalan dalam hitungan detik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas audit di tengah kompleksitas transaksi digital yang ada saat ini.

Berdasarkan sumber yang saya pelajari, terdapat beberapa poin krusial bagaimana teknologi ini mengubah kualitas hasil pemeriksaan:

a. Peralihan dari Sampling ke Audit Berbasis Populasi

Dengan *Big Data Analytics*, auditor mampu menguji 100% data transaksi tanpa kecuali. Hal ini menghilangkan risiko "sampling error" di mana kesalahan mungkin tersembunyi di dalam data yang tidak terpilih sebagai sampel.

b. Kemampuan Deteksi Kecurangan (*Fraud Detection*) yang Canggih

AI dirancang untuk mengenali pola atau anomali yang tidak biasa. Sebagai contoh, jika ada transaksi yang terjadi di jam yang tidak wajar atau dengan nilai yang tidak konsisten dengan profil bisnis klien, AI akan segera memberikan peringatan kepada auditor. Ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan.

c. Efisiensi dan Penghematan Waktu

Banyak tugas administratif dalam audit yang bersifat repetitif dan membosankan. Dengan adanya otomasi lewat AI, tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan jauh lebih cepat. Auditor kemudian dapat mengalokasikan waktunya untuk fokus pada analisis risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan penilaian manusia yang lebih mendalam (*judgment*).

Dari sudut pandang akademis, penggunaan teknologi ini mendukung auditor dalam memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) secara lebih maksimal. Kualitas bukti audit yang dikumpulkan menjadi lebih kompeten dan relevan karena berasal dari data yang utuh. Selain itu, transparansi yang ditawarkan oleh audit digital membuat proses pemeriksaan menjadi lebih objektif dan meminimalkan bias manusia yang mungkin terjadi selama proses audit lapangan.

Menurut pendapat saya, integrasi AI dan Big Data dalam praktik audit adalah sebuah kemajuan yang sangat positif namun juga menantang. Saya melihat bahwa teknologi ini bukan hadir untuk menggantikan peran auditor manusia, melainkan untuk memperkuat kapasitas kita dalam menganalisis informasi yang sangat luas. Sebagai mahasiswa ekonomi, saya menilai bahwa ketergantungan pada teknologi juga memiliki risiko tersendiri jika tidak dibarengi dengan pemahaman teknis yang kuat.

Selain itu, kita tidak boleh terlalu bergantung secara buta pada hasil algoritma. AI adalah alat yang hebat, namun ia tetap tidak memiliki "nurani" dan pemahaman

kontekstual yang mendalam seperti manusia. Oleh karena itu, integritas dan keberanian moral seorang auditor tetaplah faktor yang paling menentukan kualitas audit. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, saya memandang penting bagi lembaga pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan teknologi ini. Lulusan akuntansi tidak boleh hanya mahir dalam menyusun jurnal manual, tetapi harus memiliki literasi digital yang kuat untuk mampu berinteraksi dengan sistem cerdas. Bagi saya, kualitas audit di masa depan adalah hasil perkawinan antara ketepatan mesin dan kebijaksanaan etika manusia.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence dan Big Data Analytics berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas audit di era digital. Teknologi ini mampu menambal kelemahan-kelemahan metode konvensional melalui pemeriksaan data yang utuh, deteksi kecurangan yang lebih cerdas, dan efisiensi prosedur yang lebih tinggi. Meskipun demikian, peran auditor manusia tetaplah sentral dalam memberikan penilaian akhir yang beretika dan bertanggung jawab. Transformasi digital ini harus disambut dengan peningkatan kompetensi dan tetap menjunjung tinggi independensi serta kode etik profesi demi menjaga kepercayaan publik terhadap keandalan informasi keuangan.

EVALUASI MENDALAM TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA MELALUI IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) BPK RI

(<https://www.bpk.go.id/ihps>)

Identitas Sumber

Judul : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Topik Utama: Ringkasan komprehensif atas temuan, opini, dan rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun daerah.

Hasil

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) adalah dokumen konstitusional yang secara periodik diserahkan oleh BPK kepada lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Masalah mendasar yang diungkap dalam dokumen ini adalah potret realita pengelolaan keuangan negara yang seringkali diwarnai oleh ketidakpatuhan terhadap batas-batas anggaran dan peraturan. IHPS mencakup hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan dalam satu semester berjalan.

Bagi kita di program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, IHPS merupakan sumber data primer yang menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal diimplementasikan di lapangan. Laporan ini menyoroti kelemahan sistematis dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang sering menjadi celah terjadinya kebocoran anggaran. IHPS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen transparansi yang memungkinkan publik menilai apakah pemerintah telah bekerja secara jujur dalam mengelola aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Fokus utama dalam setiap semester adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Dalam struktur IHPS yang lebih mendalam, terdapat beberapa kategori pemeriksaan yang memberikan dampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan:

a. Analisis Opini Laporan Keuangan

IHPS mencatat perkembangan opini audit dari seluruh kementerian dan lembaga. Meskipun tren opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat, BPK tetap memberikan penekanan pada "temuan berulang" yang mencerminkan belum maksimalnya perbaikan sistem keuangan di beberapa entitas. Hal ini menunjukkan bahwa audit keuangan tidak hanya mencari kebenaran angka, tetapi juga mengevaluasi kepatuhan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten.

b. Audit Kinerja dan Efektivitas Program

Bagian ini sangat krusial karena menilai aspek *Outcome* (manfaat) dari sebuah program pemerintah. IHPS sering menemukan bahwa sebuah program mungkin sukses secara penyerapan anggaran, namun gagal dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, audit pada sektor infrastruktur atau bantuan sosial yang sering terkendala masalah akurasi data penerima.

c. Temuan Kerugian Negara dan Pemulihan Aset

Salah satu bagian paling signifikan dalam IHPS adalah rekapitulasi nilai temuan yang berdampak finansial, seperti kelebihan pembayaran atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. BPK memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penyetoran kembali uang tersebut ke kas negara. Hal ini membuktikan peran vital pemeriksaan akuntansi dalam melakukan pengamanan aset negara dari praktik pemborosan.

Kualitas sebuah audit sangat bergantung pada tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa. IHPS menyajikan data mengenai persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, sedang dalam proses, atau bahkan yang belum ditindaklanjuti sama sekali. Tingkat kepatuhan entitas dalam menjalankan rekomendasi BPK merupakan indikator utama keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan.

Menurut pendapat saya, dokumen IHPS BPK RI adalah bukti nyata bahwa keterbukaan informasi publik dalam hal keuangan negara sudah berjalan ke arah yang benar, meskipun tantangannya masih sangat besar. Saya melihat adanya kesenjangan antara banyaknya temuan administratif dengan penegakan hukum yang seringkali memakan waktu lama. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa laporan ini harus

menjadi dasar bagi kita untuk berpikir kritis: apakah opini WTP yang diraih sebuah daerah sudah sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di sana?

Selain itu, kedepannya IHPS harus lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam agar kontrol sosial menjadi lebih kuat. Penggunaan teknologi informasi dalam proses audit (*E-Audit*) harus terus ditingkatkan oleh BPK untuk meminimalkan interaksi fisik yang berisiko menimbulkan kompromi antara auditor dan klien. Integritas bagi seorang pemeriksa adalah mahkota tertinggi; tanpa itu, angka-angka dalam IHPS tidak akan memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan. Kita sebagai calon lulusan ekonomi harus membiasakan diri membaca laporan-laporan seperti ini agar memiliki orientasi kerja yang berlandaskan pada prinsip kejujuran dan akuntabilitas publik.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) merupakan pilar utama dalam menjaga marwah pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dengan menyajikan temuan secara transparan mengenai kelemahan sistem dan pelanggaran aturan, BPK telah memberikan peta jalan yang jelas bagi perbaikan birokrasi. Meskipun opini keuangan semakin membaik, fokus pada pemeriksaan kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran harus tetap menjadi prioritas utama. Pemeriksaan akuntansi yang berkualitas tinggi, yang ditopang oleh independensi dan integritas auditor, adalah syarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

ANALISIS TRANSPARANSI KORPORASI DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA LAPORAN TAHUNAN PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

(https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/investor-hubungan-laporan-tahunan-138)

Identitas Sumber

Judul : Laporan Tahunan (Annual Report) PT Telkom Indonesia

Instansi : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Topik Utama: Laporan komprehensif mengenai kinerja keuangan, strategi bisnis digital, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) selama satu tahun buku

Hasil

Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia berfungsi sebagai instrumen komunikasi utama antara manajemen perusahaan dengan para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Masalah mendasar yang sering menjadi fokus dalam analisis laporan ini adalah bagaimana perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan laba di tengah persaingan industri telekomunikasi yang sangat ketat dan transformasi menuju perusahaan digital (*Digital Telco*). Laporan ini menyajikan informasi yang sangat mendalam mengenai posisi keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen.

Dalam perspektif pemeriksaan akuntansi, transparansi yang disajikan dalam laporan tahunan ini mencerminkan komitmen kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku, baik Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia maupun standar internasional jika perusahaan melantai di bursa luar negeri. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, saya memandang laporan tahunan ini bukan sekadar kumpulan angka statistik, melainkan sebuah dokumen pertanggungjawaban publik atas penggunaan modal investor. Kejelasan informasi dalam laporan ini menjadi dasar utama bagi pasar modal untuk menentukan valuasi perusahaan serta menjadi acuan bagi kreditor dalam menilai tingkat risiko kredit perusahaan.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap struktur Laporan Tahunan PT Telkom, terdapat beberapa poin krusial yang berhubungan langsung dengan kualitas pemeriksaan akuntansi dan pengawasan internal:

a. Laporan Auditor Independen

Bagian ini merupakan inti dari kepercayaan publik terhadap angka-angka yang disajikan. Opini yang diberikan oleh auditor eksternal memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup evaluasi atas kebijakan akuntansi yang digunakan serta penilaian terhadap estimasi akuntansi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen.

b. Laporan Komite Audit dan Dewan Komisaris

Telkom menyertakan laporan pengawasan dari Komite Audit yang merinci frekuensi rapat dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Keberadaan Komite Audit sangat vital untuk memastikan bahwa proses audit eksternal berjalan secara independen dan tanpa intervensi dari manajemen eksekutif.

c. Analisis dan Pembahasan Manajemen (MD&A)

Bagian ini menjelaskan aspek operasional di balik angka keuangan. Auditor sering kali mencermati apakah narasi yang disampaikan manajemen dalam MD&A sejalan dengan temuan angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Ketidaksinkronan antara narasi bisnis dan hasil keuangan dapat menjadi indikasi awal adanya salah saji material atau manipulasi informasi.

PT Telkom secara detail memaparkan penerapan prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dalam aspek pemeriksaan akuntansi, penerapan GCG yang kuat terbukti mampu meminimalkan risiko kecurangan (*fraud*) dan meningkatkan efektivitas audit internal. Laporan ini juga merinci sistem manajemen risiko yang diterapkan untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan fluktuasi ekonomi global.

Dalam analisis terhadap Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia, terlihat adanya tingkat pengungkapan (*disclosure*) yang sangat tinggi, yang mencakup aspek keuangan maupun non-keuangan seperti tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). Berdasarkan sudut pandang akademis, integritas laporan ini sangat bergantung pada independensi

auditor eksternal yang ditunjuk. Terdapat keyakinan bahwa kualitas audit yang dihasilkan perusahaan skala besar seperti Telkom cenderung memiliki standar ketelitian yang sangat ketat karena adanya pengawasan dari regulator domestik (OJK) dan internasional jika terkait dengan pencatatan saham ganda.

Dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa secanggih apa pun sistem akuntansi digital yang digunakan oleh perusahaan sebesar Telkom, peran penilaian profesional (*professional judgment*) dari seorang pemeriksa akuntansi tetap tidak tergantikan. Ke depannya, diharapkan laporan tahunan korporasi dapat lebih mengintegrasikan aspek keberlanjutan dengan performa keuangan secara lebih eksplisit. Sebagai calon lulusan program studi Pendidikan Ekonomi, pembiasaan dalam membedah laporan tahunan korporasi besar sangatlah penting untuk memahami realitas ekonomi makro dan mikro secara nyata, melampaui pemahaman teoritis semata. Independensi dan kompetensi tetap menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk merupakan manifestasi dari akuntabilitas korporasi yang sangat baik di Indonesia. Melalui proses audit yang sistematis dan pengungkapan informasi yang transparan, perusahaan berhasil memberikan gambaran kinerja yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemeriksaan akuntansi yang berkualitas tinggi pada laporan tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan investor di pasar modal. Oleh karena itu, sinergi antara auditor eksternal yang independen, komite audit yang proaktif, dan manajemen yang berintegritas adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan sebuah perusahaan di era audit digital.

ANALISIS TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN MELALUI IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* (CTAS) DI INDONESIA

(<https://www.pajak.go.id/id/artikel/menanti-implementasi-core-tax-administration-system>)

Identitas Sumber

Judul : Implementasi *Core Tax Administration System*

Instansi : Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Topik Utama : Modernisasi sistem inti administrasi perpajakan di Indonesia guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kepatuhan wajib pajak

Hasil

Latar belakang utama dari pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS) adalah kebutuhan mendesak untuk memperbarui infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak yang selama ini masih bersifat terfragmentasi. Masalah mendasar yang dihadapi adalah keterbatasan sistem lama dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pengolahan data, hingga pemeriksaan. Dalam era audit digital, sistem administrasi yang tangguh menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa seluruh data transaksi keuangan dapat terekam secara sistematis dan transparan.

Sebagai mahasiswa Universitas Lampung yang mendalami ekonomi, saya memandang CTAS sebagai langkah revolusioner dalam meminimalisir celah ketidakpatuhan perpajakan. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses bisnis yang lebih ramping dan efisien, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif yang selama ini sering dikeluhkan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat melalui data yang lebih akurat dan terintegrasi secara nasional. Keberhasilan implementasi CTAS akan menjadi

indikator utama keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi fiskal yang berkelanjutan.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap rencana implementasi CTAS, terdapat beberapa pilar utama yang akan memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola perpajakan di Indonesia:

a. Integrasi Proses Bisnis Berbasis Digital

CTAS mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi yang sebelumnya terpisah menjadi satu sistem yang terpadu. Hal ini memungkinkan adanya pengolahan data yang jauh lebih cepat dan meminimalisir risiko kesalahan manusia dalam pencatatan data wajib pajak. Dari sisi pemeriksaan akuntansi, integrasi ini mempermudah auditor pajak dalam memverifikasi data yang disajikan oleh wajib pajak dengan data internal DJP secara otomatis.

b. Peningkatan Akurasi Manajemen Risiko (*Compliance Risk Management*)

Dengan sistem yang lebih cerdas, DJP dapat melakukan analisis risiko terhadap wajib pajak secara lebih objektif. Sistem CTAS mampu melakukan pemetaan terhadap profil wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi berdasarkan pola data keuangan yang terekam. Hal ini sejalan dengan prinsip audit modern yang berbasis risiko, di mana pengawasan diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi kerugian negara terbesar.

c. Transparansi dan Layanan Mandiri (*Taxpayer Account Management*)

CTAS menyediakan fitur akun tunggal bagi wajib pajak yang memungkinkan mereka untuk memantau kewajiban perpajakannya secara mandiri dan *real-time*. Transparansi ini sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Informasi yang lebih terbuka dan aksesibel akan mendorong terciptanya budaya kepatuhan sukarela yang lebih tinggi di masyarakat.

Implementasi sistem ini juga memaksa perusahaan untuk lebih tertib dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan. Ketajaman pengawasan digital melalui CTAS membuat praktik manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan korporasi di Indonesia karena adanya tuntutan akurasi data yang sangat tinggi dari sistem perpajakan nasional.

Perspektif Analitis Terhadap Kesiapan Sumber Daya dan Teknologi Dalam melakukan evaluasi terhadap kesiapan implementasi *Core Tax*, sangat penting untuk memperhatikan bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara auditor pajak, pengembang sistem, dan wajib pajak agar potensi dari CTAS dapat dioptimalkan secara maksimal. Dari sudut pandang akademis, terdapat tantangan besar dalam hal literasi digital, terutama bagi pelaku UMKM yang mungkin membutuhkan waktu adaptasi lebih lama terhadap sistem yang serba otomatis ini.

Dibutuhkan kesadaran bahwa transformasi menuju audit digital melalui CTAS akan mengubah pola interaksi antara pemeriksa pajak dan wajib pajak menjadi lebih profesional dan berbasis data. Penggunaan teknologi ini merupakan perwujudan dari upaya meminimalisir praktik gratifikasi atau negosiasi tidak sehat di luar sistem. Sebagai calon lulusan program studi Pendidikan Ekonomi, saya memandang bahwa penguatan kurikulum perpajakan berbasis teknologi sangat penting untuk disiapkan sejak dini di lingkungan universitas. Independensi otoritas pajak yang didukung oleh sistem TI yang mumpuni akan menjadi pilar utama dalam mencapai target penerimaan negara demi pembangunan yang lebih merata.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan lompatan besar dalam sejarah administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui integrasi proses bisnis yang kuat dan peningkatan akurasi manajemen risiko, sistem ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan perpajakan. CTAS bukan hanya alat bantu administratif, melainkan instrumen untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan peningkatan kompetensi SDM digital adalah syarat mutlak bagi keberhasilan transformasi ini demi mewujudkan kemandirian fiskal bangsa.

ANALISIS STRATEGIS PENGUATAN PERLINDUNGAN INVESTOR DAN INTEGRITAS PASAR MODAL MELALUI IMPLEMENTASI NOTASI KHUSUS SERTA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

(<https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers-detail/1183>)

Identitas Sumber

Judul : Siaran Pers: Penguatan Perlindungan Investor melalui Notasi Khusus dan Papan Pemantauan Khusus

Instansi : Bursa Efek Indonesia (BEI)

Topik Utama : Transformasi mekanisme pengawasan bursa melalui pemberian simbol peringatan dini bagi emiten guna meningkatkan transparansi dan kewaspadaan investor di pasar modal Indonesia.

Hasil

Pasar modal yang efisien dan berintegritas sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu bagi seluruh pelaku pasar tanpa terkecuali. Salah satu hambatan utama yang sering kali merugikan investor, terutama investor ritel, adalah adanya asimetri informasi yang tajam antara manajemen emiten (insider) dengan publik. Ketidakmampuan investor untuk mendeteksi secara cepat adanya pemburukan kondisi fundamental atau pelanggaran administratif pada sebuah emiten sering kali berujung pada kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meluncurkan mekanisme Notasi Khusus merupakan sebuah terobosan krusial dalam menciptakan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang inklusif.

Dalam perspektif pemeriksaan akuntansi, transparansi informasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi utama dari kepercayaan publik terhadap validitas laporan keuangan. Kebijakan ini merupakan langkah preventif untuk menekan angka manipulasi informasi dan memastikan bahwa setiap risiko yang melekat pada sebuah emiten dapat teridentifikasi secara visual dan instan. Notasi khusus ini bertindak sebagai label navigasi bagi investor, memberikan gambaran ringkas mengenai kepatuhan emiten

terhadap standar akuntansi, ketepatan waktu pelaporan, hingga status hukum yang sedang berjalan. Dengan mekanisme ini, investor didorong untuk melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi, sehingga tercipta ekosistem pasar yang lebih berkeadilan dan informatif.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap siaran pers BEI, terdapat beberapa pilar pengawasan yang secara sistematis dirancang untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia:

a. Sistem Notasi Khusus Berbasis Kondisi Riil (*Labeling System*)

BEI menyematkan simbol alfabetis yang spesifik di belakang kode saham perusahaan yang memiliki catatan khusus. Misalnya, notasi terkait adanya opini audit yang tidak wajar atau adanya keraguan atas kelangsungan usaha (*going concern*). Dari sisi pemeriksaan akuntansi, hal ini menciptakan tekanan positif bagi emiten untuk selalu menjaga kualitas laporan keuangan mereka agar terhindar dari stigma negatif pasar. Disiplin pelaporan menjadi harga mati karena keterlambatan sekecil apa pun akan langsung terekspos secara publik melalui notasi tersebut.

b. Papan Pemantauan Khusus (PPK) sebagai Filter Investasi

Mekanisme ini merupakan eskalasi dari notasi khusus, di mana saham-saham dengan kriteria risiko tinggi dikelompokkan dalam papan pencatatan terpisah. Langkah ini sangat efektif untuk memproteksi investor dari volatilitas yang tidak wajar dan memberikan ruang bagi bursa untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap emiten-emiten "bermasalah". Hal ini sejalan dengan prinsip pemeriksaan akuntansi modern yang berbasis risiko, di mana fokus pengawasan dialokasikan secara proporsional pada entitas yang memiliki indikasi ketidakstabilan operasional.

c. Penguatan Profesionalisme Auditor Eksternal

Implementasi notasi khusus secara langsung berdampak pada tanggung jawab profesi akuntan publik. Auditor dituntut untuk lebih berhati-hati dan objektif dalam memberikan opini, karena opini tersebut kini memiliki dampak reputasional yang sangat cepat melalui notasi bursa. Hal ini memperkuat rantai akuntabilitas, di mana kualitas audit menjadi benteng terakhir dalam memastikan bahwa informasi yang diterima investor benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen "seleksi alam" bagi perusahaan tercatat. Emiten didorong untuk memperbaiki tata kelola perusahaannya secara menyeluruh jika ingin mempertahankan daya tarik sahamnya di mata investor. Transparansi yang dipaksakan melalui sistem notasi ini menciptakan kompetisi yang sehat di antara emiten untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam pelaporan kinerja keuangan dan operasional mereka.

Dalam melakukan evaluasi terhadap langkah strategis BEI ini, perlu digarisbawahi bahwa efektivitas mekanisme notasi khusus sangat bergantung pada dua variabel utama: ketegasan regulator dan tingkat literasi investor. Meskipun bursa telah menyediakan infrastruktur pengawasan yang canggih, peran investor sebagai subjek investasi tetap sentral. Investor dituntut untuk mampu menerjemahkan arti dari setiap notasi sebagai bagian dari analisis fundamental dan teknikal mereka. Berdasarkan sudut pandang akademis, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi teknis mengenai notasi ini dapat dipahami secara merata oleh jutaan investor ritel baru yang masuk ke pasar modal tanpa latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat.

Dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa penguatan perlindungan investor melalui teknologi pengawasan digital merupakan respons yang sangat tepat terhadap dinamika pasar yang semakin kompleks. Penggunaan sistem otomatisasi notasi ini meminimalisir intervensi manusia dan potensi *moral hazard* dalam proses pengawasan bursa. Bagi kita sebagai mahasiswa ekonomi, fenomena ini menunjukkan bahwa audit tidak lagi bersifat statis di atas kertas, melainkan telah bertransformasi menjadi informasi dinamis yang memengaruhi pergerakan harga saham secara *real-time*. Sinergi antara otoritas pasar modal yang berwibawa dengan komunitas investor yang cerdas akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pasar modal Indonesia yang tangguh, terpercaya, dan berdaya saing global.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi digital dan penguatan transparansi melalui instrumen pengawasan yang ketat merupakan syarat mutlak dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan akuntansi serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik pada sektor publik maupun korporasi, demi terciptanya ekosistem ekonomi yang berintegritas.

ANALISIS URGENSI LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI INSTRUMEN KEBERLANJUTAN DAN AKUNTABILITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM).

(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13054/Pentingnya-Laporan-Keuangan-bagi-UMKM.html>)

Identitas Sumber

Judul : Pentingnya Laporan Keuangan bagi UMKM
Instansi : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Topik Utama : Peran strategis pembukuan dan laporan keuangan dalam mendukung pengembangan kapasitas bisnis serta aksesibilitas pembiayaan bagi sektor UMKM

Hasil

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental ekonomi nasional, namun dalam praktiknya seringkali masih dikelola dengan pendekatan tradisional yang minim dokumentasi. Masalah utama yang ditekankan dalam sumber ini adalah fenomena "pencampuran dana", di mana pelaku usaha tidak memisahkan antara aset pribadi dengan aset entitas bisnisnya. Ketiadaan pemisahan ini mengakibatkan distorsi informasi keuangan, sehingga pemilik usaha sulit menentukan apakah usahanya benar-benar mengalami pertumbuhan atau justru sedang mengonsumsi modal intinya secara perlahan.

Dalam perspektif pemeriksaan akuntansi, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban manajerial yang menyediakan data historis untuk evaluasi. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, saya memandang bahwa keengganan melakukan pembukuan bukan hanya masalah teknis, melainkan hambatan psikologis dan edukasi. Laporan keuangan seharusnya dipandang sebagai "peta navigasi" bisnis; tanpa adanya catatan yang akurat, seorang pengusaha UMKM ibarat berjalan di kegelapan tanpa tahu posisi finansial yang sebenarnya. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya dokumentasi transaksi harus dimulai dari pemahaman bahwa akuntabilitas adalah kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal.

Berdasarkan analisis yang lebih mendalam, laporan keuangan memberikan dampak multifaset bagi penguatan kapasitas UMKM sebagai berikut:

a. Instrumen Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Arus Kas menyediakan informasi mengenai struktur biaya dan profitabilitas produk. Dengan data ini, pelaku UMKM dapat melakukan analisis efisiensi, mengidentifikasi kebocoran anggaran, serta menentukan momen yang tepat untuk melakukan investasi ulang atau ekspansi pasar. Dalam dunia audit, ketersediaan data ini memungkinkan dilakukannya analisis tren untuk memprediksi stabilitas usaha di masa depan.

b. Jembatan Menuju Akses Permodalan Formal (*Bankable*)

Salah satu syarat utama bagi UMKM untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman komersial adalah adanya laporan keuangan yang kredibel. Lembaga perbankan menggunakan laporan ini sebagai alat uji kelayakan untuk menilai risiko gagal bayar. Keberadaan pembukuan yang rapi mencerminkan profesionalisme pemilik usaha dan memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa usaha tersebut memiliki manajemen risiko yang baik.

c. Transparansi Kewajiban Perpajakan dan Legalitas

Laporan keuangan yang akurat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan basis data yang jelas, penghitungan pajak menjadi lebih objektif, sehingga pelaku usaha terhindar dari potensi sanksi akibat ketidaksesuaian laporan. Selain itu, laporan keuangan seringkali menjadi prasyarat dalam pengajuan izin usaha tertentu atau saat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan secara periodik secara otomatis memaksa UMKM untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat. Setiap pengeluaran kas harus terdokumentasi dan terverifikasi, yang secara langsung meminimalisir risiko penyalahgunaan dana oleh pihak internal. Akuntabilitas yang dibangun sejak skala mikro akan membentuk budaya organisasi yang sehat, yang sangat krusial jika suatu saat UMKM tersebut berkembang menjadi perusahaan besar yang memerlukan audit eksternal secara rutin.

Dalam mengevaluasi implementasi pembukuan di sektor UMKM, tantangan terbesar terletak pada literasi digital dan keterbatasan sumber daya manusia. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan praktisi akuntansi untuk menyediakan perangkat akuntansi sederhana yang mudah dioperasikan oleh orang awam. Berdasarkan sudut pandang akademis, transisi dari pembukuan manual ke aplikasi akuntansi berbasis digital harus didorong sebagai upaya efisiensi. Teknologi akan membantu menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan akurat, namun validitas data tersebut tetap bergantung pada kejujuran pengguna dalam menginput setiap transaksi.

Dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa laporan keuangan adalah investasi, bukan beban. Sebagai calon lulusan program studi Pendidikan Ekonomi, saya menilai bahwa pemberdayaan UMKM harus menyentuh aspek fundamental yaitu mentalitas akuntabel. Tanpa integritas dalam mencatat transaksi, seanggih apa pun perangkat lunak yang digunakan tidak akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Penguatan UMKM melalui tertib administrasi keuangan adalah langkah nyata dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan transparan. Independensi dalam mengelola arus kas usaha akan menciptakan ketahanan bisnis terhadap fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen vital yang menentukan kelangsungan hidup dan daya saing UMKM di era modern. Melalui pembukuan yang disiplin dan sistematis, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga membuka peluang kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan dan investor. Pemeriksaan akuntansi yang berkualitas pada level usaha kecil dimulai dari kemauan untuk mendokumentasikan realitas keuangan secara apa adanya. Oleh karena itu, penguatan literasi akuntansi dan percepatan adopsi teknologi keuangan adalah prasyarat mutlak bagi UMKM untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, akuntabel, dan mampu berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.